

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS
DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KELURAHAN
RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MUHAMMAD KAMARULLAH
NPM. 187310539

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nama : Muhammad Kamarullah
 NPM : 187310539
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kelurahan
 Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis

Format Sistematika dan Pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Kamarullah
NPM : 187310539
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kelurahan
Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Ketua

Sekretaris

Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Anggota

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Satri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 62 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Kamarullah
 N P M : 187310539
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN BENGKALIS**

Struktur Tim :

1. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Budi Mulianto, S.IP., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Riski Setiawan, S.IP., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Juni 2022
 Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
 NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor ~~03~~ UIR-Fs/Kps/2022 tanggal 29 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Juni 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Kamarullah
 NPM : 187310539
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN BENGKALIS**
 Nilai Ujian : Angka : " ~~2,8~~ " ; Huruf : " ~~A-~~ "
 Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Ketua	
2.	Budi Muliarto, S.IP., M.Si.	Sekretaris	
3.	Riski Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	

Pekanbaru, 30 Juni 2022
 An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
 Wakil Dekan I Bfd. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Kamarullah
 NPM : 187310539
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kelurahan
 Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan Masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 18 Juli 2022
 An. Tim Penguji
 Sekretaris

Ketua


 Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si


 Budi Muliando, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan


 Indra Satri, S.Sos., M.Si


 Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dengan judul ”Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini, selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan

kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.

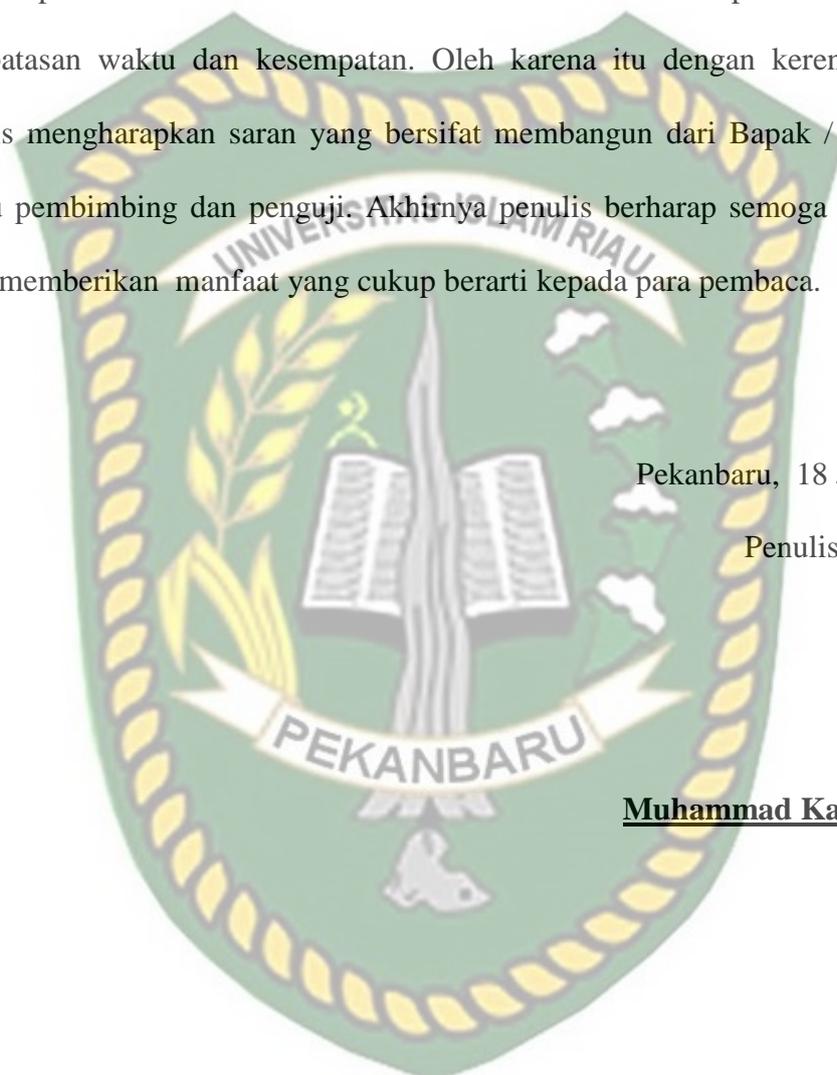
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Mata Kuliah dan Administrasi serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.
6. Kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian dan telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi sehingga terselesainya usulan penelitian ini.
7. Kepada Seluruh Informan dan Masyarakat Nelayan yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi untuk menyelesaikan usulan ini.
8. Terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tua saya Ibu Dra. Hj. Miklamaina dan ayah saya Bapak H. Zulkarnain, SH., MH, serta keluarga yang saya sayangi dan saya cintai. Dengan pengertian dan kesabaran senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penulisan usulan penelitian.
9. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulisan usulan penelitian ini berlangsung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari Bapak / Ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Penulis,

Muhammad Kamarullah



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Pemerintahan	16
2. Konsep Pemerintahan Daerah	18
3. Konsep Perikanan	19
4. Konsep Peranan	20
5. Konsep Pemberdayaan	21
6. Konsep Nelayan	23
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Pemikiran	27
D. Konsep Operasional	28

E. Operasional Variabel.....	32
------------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Teknik Penarikan Informan.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Informan dan Key Informan.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Sistematika Penulisan	39

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Kabupaten Bengkalis.....	40
2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis	42
3. Geografis Kabupaten Bengkalis.....	43
4. Kondisi Demografi Kabupaten Bengkalis	45
B. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	47
1. Sejarah.....	48
2. Visi dan Misi	48
3. Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	49
4. Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	49
5. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.....	50
6. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	51
7. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.....	55
8. Bagan Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.....	57

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identias Responden	58
1. Jenis Kelamin	58
2. Tingkat Pendidikan	58
3. Usia Informan.....	59
4. Nama dan Identitas Informan.....	60
B. Hasil dan Pembahasan.....	61
1. Bimbingan dan Bantuan Teknis	63
2. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat.....	66
3. Stimulasi dan Motivasi Kepada Masyarakat.....	68
4. Ikut Serta Masyarakat Untuk Memilih dan Mengambil Keputusan.....	70
C. Faktor Penghambat.....	73

BAB VI: PENTUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Potensi dan Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	6
I.2 Produksi Perikanan (TON) Kabupaten Bengkalis Dari Tahun 2016-2020	9
I.3 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	12
II.1 Penelitian Terdahulu	24
II.2 Konsep Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis	32
IV.1 Nama, Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	44
IV.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	55
IV.3 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jabatan	56
IV.4 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan	56
V.1 Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	58

V.2	Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	
	Terakhir	59
V.3	Kelompok Usia Informan	59
V.4	Nama dan Identitas Informan	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran	28
IV.1	Lambang Kabupaten Bengkalis	40
IV.2	Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis	46
IV.3	Lokasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	47
IV.4	Bagan Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	57



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Kamarullah
NPM : 187310539
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pernerdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwasanya, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Juli 2022



Muhammad Kamarullah

PERANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN BENGKALIS

ABSTRAK

MUHAMMAD KAMARULLAH
NPM. 187310539

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis dan untuk mengetahui hambatan dalam pemberdayaan nelayan. Konsep teori dan indikator yang digunakan terdiri atas bimbingan dan bantuan teknis, menggerakkan partisipasi masyarakat, stimulasi dan motivasi kepada masyarakat, dan ikut serta masyarakat untuk memilih dan mengambil keputusan. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan dengan mendeskripsikan dalam bentuk observasi, wawancara, dan kuisioner. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peranan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis masih belum berjalan dengan baik, hal ini didasari dari kenyataan yang ditemui bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis belum mampu meningkatkan perekonomian nelayan. Faktor penghambat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pemberdayaan nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis terhalang oleh regulasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian dalam melakukan pemberdayaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis terkendala oleh Pola pikir masyarakat nelayan untuk maju itu agak lambat, seperti mereka masih melaut dengan cara yang tradisional, dengan era teknologi sekarang semestinya nelayan terbantu dengan teknologi itu, tapi nelayan tidak bisa menggunakannya. Untuk mengatasi hal itu diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang memiliki wewenang dalam memberdayakan nelayan.

Kata Kunci: Peranan, Pemberdayaan, Nelayan

**THE ROLE OF THE FISHERIES DEPARTMENT OF
BENGKALIS REGENCY IN EMPOWERING FISHERS IN
RIMBA KELURAHAN SEKAMPUNG, BENGKALIS
DISTRICT**

ABSTRACT

**MUHAMMAD KAMARULLAH
NPM. 187310539**

This study aims to determine and analyze the role of the Bengkalis Regency Fisheries Service in empowering fishermen in Rimba Sekampung Village, Bengkalis District and to determine the obstacles in empowering fishermen. The theoretical concepts and indicators used consist of technical guidance and assistance, mobilizing community participation, stimulation and motivation to the community, and community participation in choosing and making decisions. This research is located in the Rimba Sekampung Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency and this study uses a qualitative analysis method, which is a study that directly describes the phenomena that occur in the field by describing in the form of observations, interviews, and questionnaires. The results of the study concluded that the role of the Bengkalis District Fisheries Service in empowering fishermen in the Rimba Sekampung Village, Bengkalis District was still not going well, this was based on the fact that it was found that the empowerment carried out by the Bengkalis District Fisheries Service had not been able to improve the fishermen's economy. The inhibiting factor for the Bengkalis Regency Fisheries Service in empowering fishermen in the Rimba Sekampung Village, Bengkalis District is hindered by the regulation of the Minister of Home Affairs Number 90 of 2019 concerning Classification, Codefication, and Nomenclature of Development Planning and Regional Finance, then in empowering the Bengkalis Regency Fisheries Service is constrained by the mindset of the community fishermen's progress is a bit slow, as if they are still fishing in the traditional way, with the current era of technology, fishermen should be helped by this technology, but fishermen cannot use it. To overcome this, it is hoped that the Bengkalis Regency Fisheries Service will continue to coordinate with the provincial government which has the authority to empower fishermen.

Keywords: Role, Empowerment, Fishermen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Qadar (2015) Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau yang memanjang dari barat ke timur, dengan pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan masih banyak lagi yang lainnya. Indonesia memiliki wilayah yang luas, baik laut maupun darat.

Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim, dan negara maritim memanfaatkan wilayah maritimnya dengan baik untuk transportasi laut secara umum. Karena konsep laut disebut angkutan laut, maka semua kegiatan perdagangan, perdagangan yang berhubungan dengan maritim atau angkutan niaga, maka dapat disimpulkan bahwa laut adalah istilah maritim dan kelautan yang berkaitan dengan angkutan dan perdagangan maritim. Pengertian laut yang terkenal adalah kegiatan maritim yang berkaitan dengan transportasi dan perdagangan laut, sehingga kegiatan laut yang melibatkan eksplorasi dan eksploitasi, seperti penangkapan ikan, tidak bersifat maritim.

Jenawi et al., (2019) Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, dengan 30% wilayah daratannya dan 70% sisanya lautan. Di negara yang memiliki banyak pulau, laut dianggap sebagai sarana penghubung antar wilayah. Tentu saja, luasnya lautan berdampak positif pada kelimpahan sumber daya laut yang tersedia untuk kepentingan umum.

Dari berbagai jenis sumber daya laut, Indonesia memiliki stok perikanan yang sangat besar, dan ada beberapa jenis ikan yang dapat diklasifikasikan sebagai langka dan terancam punah. Dari fakta di atas dapat dilihat bahwa Indonesia harus menjadi negara yang makmur dan kemudian rakyatnya bisa sejahtera.

Sebagian besar mata pencaharian Indonesia didasarkan pada sumber daya alam di lautan dan perairan, dan masyarakat Indonesia bergantung pada produk ikan di lautan dan perairan. Salah satu kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut adalah penangkapan ikan.

Menurut Windasai et al (2021), nelayan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang sama dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam mengelola sumber daya perikanan. Nelayan adalah mereka yang mencari nafkah dengan menangkap ikan berdasarkan UU Perikanan 2009. Sedangkan nelayan kecil adalah mereka yang mencari nafkah dengan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan kapal penangkap ikan dengan kapasitas maksimal lima ton total (5GT). Menurut Rosnie (2017; 53), apa yang dimaksud dengan komunitas nelayan, seperti masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang mencari nafkah dengan memanfaatkan sumber daya laut (SDA) seperti ikan, udang, rumput laut, dan kerang tiram, terumbu karang dan sumber daya laut lainnya.

Di era desentralisasi ini, pemerintah pusat telah memberdayakan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya berdasarkan prinsip otonomi, dalam hal ini pemerintah daerah harus memainkan perannya dalam mencapai tujuan

negara. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah.

Menurut Nadir (2013) desentralisasi bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pemerintahan di semua lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi merepresentasikan struktur vertikal kekuasaan negara. Di Indonesia, desentralisasi kemudian diimplementasikan sebagai kebijakan kemandirian daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan daerah otonom sebagai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan daerah otonom dan kepentingan warga negara setempat dalam satu kesatuan sistem. Provinsi Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, urusan tersebut yaitu :

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk mengurus daerah nya sendiri. Dalam Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Tenaga kerja.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pangan.
4. Pertanahan.
5. Lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

9. Perhubungan.
10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah.
12. Penanaman modal.
13. Kepemudaan dan olahraga.
14. Statistik.
15. Persandian.
16. Kebudayaan.
17. Perpustakaan.
18. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintah yang dilihat dari potensi daerah yang meliputi :

1. Kelautan dan perikanan.
2. Pariwisata.
3. Pertanian.
4. Kehutanan.
5. Energi dan sumber daya mineral.
6. Perdagangan.
7. Perindustrian.
8. Transmigrasi.



Menurut Christiani (2014) Bengkalis merupakan daerah otonom dengan potensi yang sangat besar di wilayah tersebut, salah satunya adalah kekayaan laut yang melimpah. Dengan ibukota Bengkalis, Bengkalis adalah salah satu dari 12 provinsi/kota di Riau. Wilayahnya meliputi daratan di pesisir timur pulau Sumatera. Secara geografis, Bengkalis terletak pada 2°30'-0°17' LU dan 100°52'-102° 10' BT. Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan, dengan 446 km garis pantai dan zona pesisir.

Susilawati (2019) menganggap Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah perikanan dan kelautan terkaya di provinsi Riau. Besarnya potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki Kabupaten Bengkalis dapat dipahami, mengingat letak geografisnya yang cukup strategis.

Tabel I.1 : Potensi dan Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

JENIS KEGIATAN	POTENSI	PEMANFAATAN	LOKASI KECAMATAN
Penangkapan	11.200 ton	5.789,87 ton	Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Pinggir, Talang Muandau, Bathin Solapan, Bandar Laksamana dan Bukit Batu
		158,10 ton	Siak Kecil, Pinggir, Talang Muandau, Bathin Solapan dan Bandar Laksamana
Budidaya di Keramba Jaring Apung (KJA)	6.290 kantong	Tidak ada	Rupat, Bathin Solapan, Siak Kecil dan Talang Muandau
Budidaya Tambak	1.358,53 ha	486,56 ha	Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana Rupat dan Rupat Utara
Budidaya Kolam	631,9 ha	24,20 ha	Mandau, Pinggir, Bantan, Bathin Solapan, Bandar Laksamana, Bengkalis, Siak

			Kecil, Bukit Batu Rupa dan Rupa Utara
Pembenihan Ikan Laut/Udang	3.000.000 ekor	493.330 ekor	Kecamatan Bantan
Pembenihan Ikan Air Tawar	6.000.000 ekor	1.012.582 ekor	Pinggir, Bengkalis, Bathin Solapan dan Mandau

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Dinas Perikanan Bengkalis, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan otoritas kelautan dan perikanan, memainkan peran penting dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya kelautan dan perikanan. Menurut Windasai (2021), ini merupakan tanggung jawab utama dari badan tersebut, dan dengan demikian diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat nelayan dan kemudian mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kita dalam rangka mensejahterakan rakyat, diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang optimal dan merata.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah Instansi Teknis Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati selaku kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Hal yang mengenai tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah diatur dengan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Bengkalis Nomor 84 Tahun 2019.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas perikanan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.
2. Penyelenggaraan kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Kelautan dan Perikanan.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan.

Selanjutnya dalam RPJMD 2016-2021, Perikanan memiliki visi sebagai salah satu OPD yang berperan di bidang kelautan dan perikanan.

1. Menerapkan penangkapan ikan Bengal yang kuat dan berkelanjutan.

Sesuai dengan misi berikut:

1. Mewujudkan masyarakat nelayan yang sejahtera.
2. Kesadaran akan ketersediaan stok ikan.

3. Membangun sistem manajemen yang baik.

Untuk memperjelas program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan, maka perlu dilaksanakan maksud dan tujuan tersebut. Departemen Perikanan Bengkalis harus memenuhi tujuan berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan usaha perikanan.
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan.
3. Meningkatkan kinerja keuangan.

Pada saat yang sama, tujuan dari layanan penangkapan ikan Bengkalis adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha perikanan.
2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3. Meningkatkan konsumsi produk ikan.
4. Meningkatkan kualitas kinerja.

Berdasarkan data Dinas Perikanan Bengkalis, produksi ikan Bengkalis selama tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel I.2 :Data Produksi Perikanan (TON) Kabupaten Bengkalis Dari Tahun 2016 s.d 2020

TAHUN	IKAN LAUT (TON)			TANGKAP PERAIRAN UMUM	IKAN AIR TAWAR	TOTAL
	Tangkap Sea	Tambak Duke	KJA/Laut (KJA) Sea			
2020	5,789,87	1.001,73	-	158,10	64,18	7.013,87
2019	6,126,11	897,34	-	136,32	67,91	7.227,68
2018	6,268.40	305,75	-	129,27	73,78	6.777,20
2017	6,587.30	163,63	-	67,29	168,61	6.966,83
2016	7,085.60	81,58	0,14	85,84	326,47	7.579,63

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan 12,5 miliar untuk tahun 2020, yang meliputi program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan, program pengembangan sistem perluasan perikanan, dan program pengembangan sumber daya perikanan.

Menurut Windasai (2021), pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan, serta mengarahkan sumber dayanya menuju kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan akhir perlindungan dan peningkatan kapasitas perikanan, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dalam bentuk produk hukum, seperti peraturan daerah atau peraturan gubernur dan peraturan lain yang terkait dengan peningkatan kapasitas nelayan.

Anwar (2018) percaya bahwa kepedulian tidak berpihak pada nelayan. Standar hidup nelayan ditentukan oleh perburuan mereka. Jumlah hasil tangkapan yang ditangkap dapat mencerminkan besarnya pendapatan yang diperoleh, yang sebagian besar dihabiskan untuk konsumsi keluarga atau kebutuhan fisik yang minimal. Situasi masyarakat nelayan atau kelompok pesisir di berbagai wilayah Indonesia secara umum memiliki beberapa karakteristik. kemiskinan, keterbelakangan sosial dan budaya, dan kualitas sumber daya yang buruk. Sebagian besar masyarakat pesisir memiliki pendidikan sekolah dasar (SD) atau tidak pendidikan dasar, sehingga kekurangan sumber daya manusia, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).), atau kapasitas organisasi masyarakat sipil. Kemiskinan, kesenjangan sosial, degradasi

lingkungan, dan kurangnya infrastruktur dasar adalah beberapa tantangan yang dihadapi nelayan.

Menurut Prakoso (Januari 2018), asosiasi nelayan mengklaim bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti kurangnya modal yang dimiliki nelayan, kurangnya akses teknologi dan pasar, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Faktor lain, seperti sarana dan prasarana sosial di wilayah pesisir, dikenal sebagai faktor sosial seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang rendah.

Situasi serupa disebutkan dalam Kusnadi (Rosni, 2017; 53-54), dimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan. Faktor-faktor tersebut antara lain: faktor internal, seperti (1) kualitas sumber daya manusia yang terbatas; (2) keterbatasan kapasitas modal kerja dan teknologi penangkapan ikan; (3) hubungan kerja di fasilitas penahanan yang tidak banyak memberikan manfaat bagi pekerja; (4) kesulitan dalam diversifikasi kegiatan penangkapan ikan; (5) sangat bergantung pada profesi maritim; (6) gaya hidup yang dianggap terlalu boros sehingga kurang berwawasan ke depan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi: (1) kebijakan pengembangan perikanan yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) kerusakan ekosistem.

Adapun jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Kabupaten Bengkalis dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 : Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Fishery of		Budidaya Cultured			Jumlah
		Laut/ sea	Perairan/ Open water	Kolam/ Water Pond	Tamba k /Duke	(KJA) Laut/ sea	
1	2020	4.288	695	215	318	-	5.516
2	2019	3.343	601	221	72	-	4.237
3	2018	3.036	391	443	71	-	3.941
4	2017	2.945	212	644	43	-	3.844
5	2016	2.972	367	1.563	85	10	5.5056

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Agar tidak memperparah hal tersebut, Bupati Bengkalis terdiri dari: Peraturan 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Hirarki, Tugas, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Dinas Perikanan Bengkalis.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Pemberdayaan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan.
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan.
4. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan.
 - b. Seksi Pencatatan Usaha Perikanan.
 - c. Seksi Produksi Perikanan.

5. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
 - b. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - c. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya.
6. Unit Pelaksana Teknis, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari beberapa struktur organisasi tersebut, salah satunya memiliki fungsi kekuasaan yaitu melakukan pembinaan terhadap peningkatan kapasitas perikanan, pengembangan keterampilan, pendidikan, pelatihan, serta peningkatan usaha sarana dan prasarana perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bidang Pengembangan Kapasitas Perikanan memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Melaksanakan penyuluhan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan perikanan.
3. Memanfaatkan teknologi penangkapan ikan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perikanan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan.
5. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh atasan.

Ada beberapa fenomena terkait pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kelurahan Rimba Sekampung, yaitu:

1. Masih rendahnya pendapatan nelayan, hal ini dikarenakan pendapatan nelayan bergantung pada hasil tangkapan, sehingga perlu adanya

program-program budidaya perikanan bagi para nelayan agar pendapatan nelayan tidak bergantung dari hasil tangkapan.

2. Minimnya kebijakan pemerintah daerah terhadap program yang menunjang terhadap pengembangan kapasitas nelayan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta fenomena atau gejala yang telah di uraikan, maka peneliti dapat merumuskan masalah pokok, yakni :

1. Bagaimana Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.
2. Apa saja hambatan Dinas perikanan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan perannya untuk memberdayakan kehidupan masarakat nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Kelutan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam memberdayakan kehidupan nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam memberdayakan kehidupan nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, teks ini merupakan salah satu pengembangan dan manfaat ilmu pengetahuan, khususnya ilmu negara, dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang sejenis.
2. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini memberikan informasi tambahan untuk penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan penelitian serupa.
3. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, juga sebagai sumber informasi bagi stakeholders yang berperan penting dalam peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Rimba Sekampung, distrik Bengkalis.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pemerintahan sebagai: (1) suatu sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang dengan kewajiban terbatas untuk menjalankan wewenang; (3) penguasa negara (bagian dari negara) - misalnya, negara adalah pemerintah, negara membutuhkan orang yang kuat dan cerdas; (4) badan tertinggi negara (kabinet, pemerintah, dll.) - beberapa anggota DPRK meminta agar rancangan undang-undang tersebut segera diserahkan kepada DPRK, dan tanggapannya dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri; dan (5) negeri atau provinsi (berlawanan dengan swasta dan swasta) - sekolah dan sekolah swasta harus dibangun di tiga tingkat (Abdullah, 2016).

Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintah dibagi kedalam beberapa tingkatan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang meliputi Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Menurut Pada tingkat pusat, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden dibantu satu orang wakil presiden dan oleh menteri negara, pada tingkatan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Menurut Maulidiah dalam (Absori, 2020), pemerintah adalah organisasi atau lembaga yang secara hukum (legal) diberikan oleh rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi dalam rangka melaksanakan tugas negara (state power) suatu negara. dilengkapi dengan equipment.country yang lengkap. Oleh karena itu, badan penyelenggara negara tidak lain adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berada di bawah kewenangan masing-masing badan yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Rauf (2017), secara umum negara dapat diartikan sebagai otoritas yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menegakkan peraturan perundang-undangan di daerah-daerah tertentu. Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.
- b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
- c) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
- d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Siagian dalam (Jenawi dkk, 2019;23-24) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintah, antara lain :

- a) Sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
- b) Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.

- c) Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- d) Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
- e) Fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat 2 UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan wakil dari pemerintah daerah dan rakyat daerah yang melaksanakan di dalam. Sedapat mungkin dalam kerangka sistem negara kesatuan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Huda (Ondang dkk, 2019; 3-4), pemerintah daerah, sebagai subsistem dari sistem pemerintahan nasional, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya. Kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga memiliki tiga komponen utama, yaitu: pertama, amanat dan wewenang untuk menyelesaikan kekuasaan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, memberi mereka kepercayaan diri dan wewenang untuk berpikir, mengambil inisiatif, dan menentukan cara menyelesaikan tugas mereka; Ketiga, mencoba melibatkan publik dan DPRK secara langsung dalam berpikir, berinisiatif, dan mengambil keputusan.

Menurut Abdullah (2016; 87), pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang menjadi bagian dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah otoritas administratif di wilayah yang lebih kecil dari suatu negara. Notasi ini digunakan untuk mengkompensasi organisasi tingkat

negara bagian yang disebut pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (jika sesuai) pemerintah federal. "Pemerintah daerah" beroperasi hanya di bawah wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau di bawah arahan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, dan setiap negara memiliki jenis pemerintah daerah yang berbeda.

Menurut Djajuli (2018; 9), salah satu peran pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, artinya pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatannya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. termasuk rasa aman dan perlindungan di lingkungannya.

3. Konsep Perikanan

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

Menurut Tangke (2011; 54), penangkapan ikan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi menangkap dan membudidayakan hewan dan tumbuhan air yang hidup bebas di lautan atau perairan umum. Secara umum, penangkapan ikan dibagi menjadi penangkapan ikan dan penangkapan ikan. Penangkapan ikan konstruksi adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan penangkapan dan pengumpulan hewan dan tumbuhan air yang hidup bebas di laut dan di perairan

umum, dan akuakultur adalah kegiatan ekonomi membudidayakan hewan dan tumbuhan air yang hidup di laut atau di perairan umum. .

4. Konsep Peranan

Menurut Soekanto (Cartago, 2014; 1997), tugas adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menunaikan kewajibannya.

Menurut Riyadi dalam (Jenawi et al., 2019) Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep peran partai dalam oposisi sosial. Dengan memenuhi peran ini, baik pelaku kejahatan, individu, maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan individu atau lingkungan.

Menurut Windasai et al (2021), tanggung jawab adalah sikap dan tindakan yang diharapkan dari banyak orang dalam suatu masyarakat atau lingkungannya. jika peran tersebut terkait dengan peran pemerintah daerah, khususnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, serta penyelenggaraan pemerintahan. Jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, berarti telah memenuhi kewajibannya yang merupakan aspek dinamis dari jabatan tersebut.

Menurut Syaukani dalam (Angraini dan Syamsir, 2019; 26) Peran Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan birokrasi terhadap masyarakat.
- b. Memperpendek struktur kerja dan yang terkesan birokratis dan bertele-tele.
- c. Mempermudah perijinan usaha.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan.

- e. Menyediakan media stimulus bagi masyarakat untuk diberdayakan dalam pembangunan usaha dan sebagainya.

Menurut Ndraha (Moldjo dkk, 2021), peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah: memberikan bimbingan dan bantuan teknis; meningkatkan partisipasi publik; untuk menginspirasi dan menginspirasi masyarakat; memungkinkan masyarakat untuk memilih dan membuat alternatif.

Menurut Anggraini dan Syamsir (2019; 26), kewajiban adalah suatu tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang, dan jika tugas itu dilaksanakan sesuai dengan tugas itu berarti orang tersebut telah melaksanakan tugas tersebut.

5. Konsep Pemberdayaan

Menurut Ibrahim (2016), kekuasaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberdayakan atau meningkatkan seseorang, kelompok, atau masyarakat tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi. masyarakat, terutama kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan dan ketidakberdayaan. Dalam pembangunan, istilah 'wewenang' bukanlah istilah baru dan sering digunakan sejak disadari bahwa faktor manusia memegang peranan penting dalam pembangunan.

Menurut Sugiri (2012; 58), kekuasaan adalah proses pemberdayaan, pemberdayaan. dan keterampilan. Pelanggan (publik) percaya sehingga memiliki kekuatan/kekuatan untuk mengatasi tantangan

yang dihadapi guna mencapai kehidupan yang lebih baik sehingga dapat menentukan masa depan sesuai keinginannya.

Windasai dkk (2021; 797) pemberdayaan adalah proses dan tujuan, karena pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan kelompok rentan, termasuk mereka yang menghadapi kemiskinan. Dengan demikian, pemberdayaan mengarah pada pencapaian sosial, yaitu kekuatan untuk berkuasa, atau pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial seseorang, seperti kepercayaan diri, serta melalui perubahan sosial. menyampaikan aspirasi, mencari nafkah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, memenuhi tugas hidup secara mandiri.

Menurut Sujarvani dkk (2018; 19-20), pemberdayaan masyarakat adalah tindakan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat memperbaiki dan menentukan kehidupan masa depan mereka sesuai keinginan. Dengan memperkuat kemampuan mereka, seperti pengetahuan, sumber daya, ide dan keterampilan.

Menurut Sulistiani (Soero et al, 2014; 42), capacity building adalah proses pembelajaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara bertahap dan harus melalui tahapan sebagai berikut.

- 1) Tahap pembentukan perilaku menuju perilaku yang sadar dan peduli sehingga setiap pribadi akan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat me-ngambil peran dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan berinovasi untuk menuju kemandirian.

Dengan melaksanakan langkah-langkah pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat mampu mandiri dalam berbagai kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah (Soero et al., 2014; 42).

Menurut Payne (Suhu et al, 2020; 19), tujuan kekuasaan adalah untuk memberdayakan kelompok rentan: a) memenuhi kebutuhan dasarnya dalam arti tidak bebas. bebas mengekspresikan pandangan, tetapi bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari penyakit. b) Memelihara sumber daya produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

6. Konsep Nelayan

Nelayan adalah mereka yang mencari nafkah dengan menangkap ikan berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 (Helmi dan Satria, 2012; 68). Nelayan juga merupakan orang yang mencari ikan di laut dan mata pencahariannya bergantung pada cuaca (Rosni, 2017; 55).

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam (Rosni, 2017; 55) menyatakan bahwa nelayan adalah orang yang mencari nafkah dengan menangkap ikan di laut.

Nelayan tidak dianggap melakukan pekerjaan membuat jala, mengangkut alat tangkap dengan perahu atau perahu motor, atau mengangkut ikan dengan perahu atau perahu motor.

Sedangkan menurut Suarjono (Anwar, 2018: 19), nelayan adalah orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan hewan air atau tumbuhan air lainnya.

Mulyadi (Suhu et al, 2020; 20) membagi nelayan menjadi tiga kelompok: (1) nelayan buruh, (2) nelayan kapal, dan (3) nelayan mandiri. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang lain. Nelayan senior, di sisi lain, adalah nelayan dengan alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Nelayan swasta adalah nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri dan tidak melibatkan orang lain dalam kegiatannya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Lia Angraini dan Syamsir (2019)	Jurnal	Peran Dinas perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Perairan Danau Singkara	1. Objek Penelitian Peran Dinas 2. Subjek Penelitian pada Dinas Perikanan	1. Lokasi Penelitian 2. Fokus Penelitian pada penelitian mengenai focus pada pemberdayaan nelayan	Peran Dinas perikanan Provinsi Sumatera Barat tidak diterapkan dengan baik dalam mengatasi illegal fishing (menggunakan jaring apung) di Danau

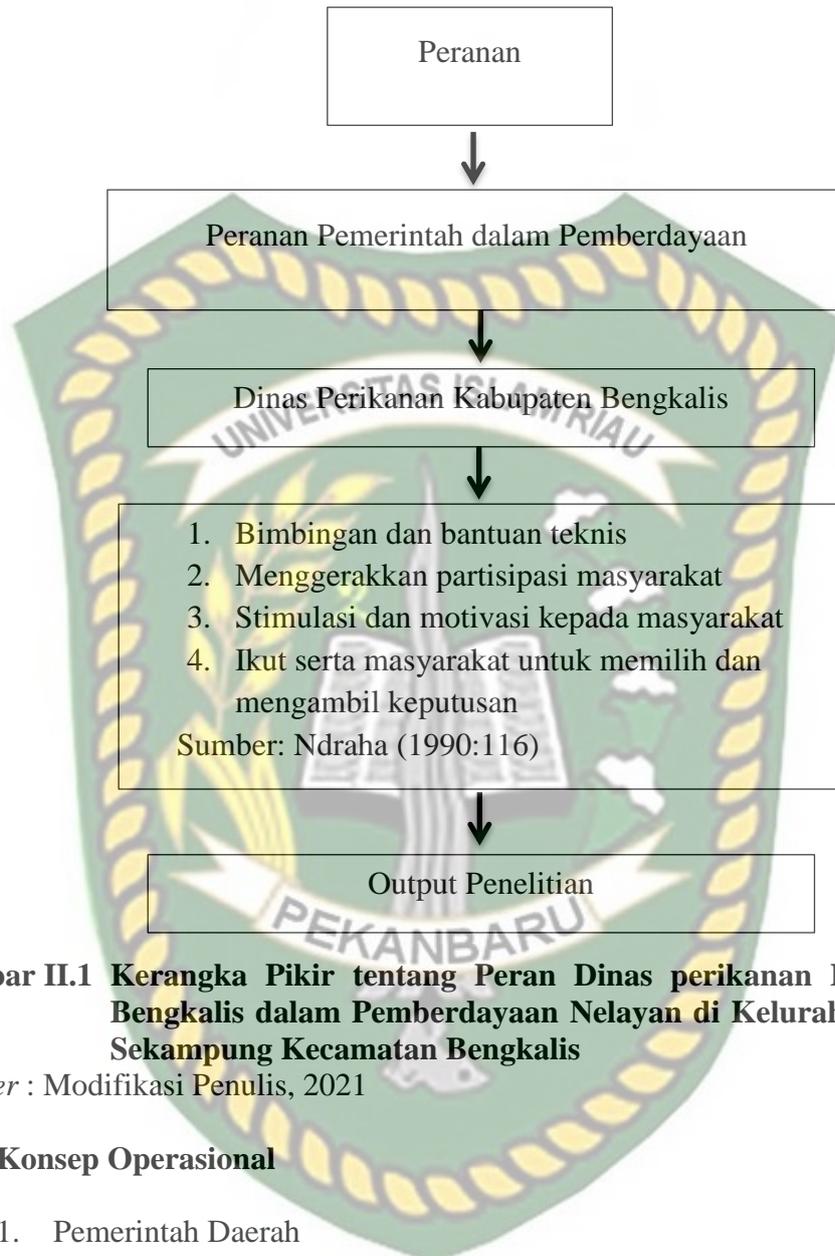
			k			Singkarak. Masyarakat nelayan di sekitar danau masih melakukan illegal fishing.
2	Riri Moldjo (2021)	Jurnal	Peran Dinas perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Iumput Laut	<ol style="list-style-type: none"> Objek penelitian peran dinas Subjek penelitian pada Dinas perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi penelitian Fokus penelitian pada peneliti menggunakan focus pada pemberdayaan nelayan 	Peran Dinas perikanan Kabupaten Minahasa Utara dalam memberdayakan masyarakat petani rumput laut sudah baik, namun permasalahan yang terjadi adalah kurangnya anggaran yang tersedia.
3	Billy Jenawi (2019)	Jurnal	Peran Dinas perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam	<ol style="list-style-type: none"> Objek penelitian peran dinas Subjek penelitian pada Dinas perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi penelitian Fokus penelitian pada peneliti menggunakan focus pada 	Peran Dinas perikanan sudah cukup baik dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat

			Perindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah)	an 3. Sama-sama penelitian deskriptif	pemberdayaan nelayan	
4	Maulana Ibrahim (2016)	Jurnal	Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samari	1. Objek penelitian peran dinas 2. Sama-sama penelitian deskriptif	1. Lokasi penelitian 2. Fokus penelitian pada penelitian menggunakan focus pada pemberdayaan nelayan	Peran Dinas Koperasi dan UKM sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung dengan meningkatnya jumlah UKM yang ada di Kota Samarinda khususnya di Kelurahan Jawa

			nda Ulu Kota Samarinda			
5	Fiqih Putra Arifandy (2020)	Jurnal	Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan : Perspektif Modal Kerja	1. Objek penelitian peran dinas 2. Sama-sama penelitian deskriptif	1. Lokasi penelitian 2. Objek penelitian	Peran Dinas Koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kesadaran masyarakat dalam berkoperasi.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui alur pemikiran dari sebuah penelitian, diperlukan kerangka berpikir untuk menemukan landasan pemikiran. Kerangka refleksi peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan kapasitas nelayan di Kabupaten Bengkalis (Desa Rimba Sekampung) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.1 Kerangka Pikir tentang Peran Dinas perikanan Kabupaten Bengkalis dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.

2. Perikanan

Perikanan adalah suatu kegiatan ekonomi di bidang penangkapan dan pembudidayaan hewan atau tanaman air yang hidup bebas di laut atau perairan umum.

3. Peran

Peran merupakan sikap atau tindakan seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat yang diharapkan oleh banyak orang atau lingkungannya. Peran yang dimaksud dalam penelitian yaitu apakah sudah berperan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam Pemberdayaan nelayan Kecamatan Bengkalis (Kelurahan Rimba Sekampung).

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses pemberian daya (power) berupa kesempatan atau peluang, pengetahuan, keahlian, dan materi, sehingga membuat yang tidak berdaya (powerless) menjadi memiliki kekuasaan (powerfull) atau membantu meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan rasa percaya diri klien (masyarakat) sehingga mereka mempunyai Daya/kekuatan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dalam rangka mencapai Kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat menentukan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apakah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai instansi pemerintah yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai kedudukannya sudah menjalankan

pemberdayaan kepada nelayan Kecamatan Bengkalis (Kelurahan Rimba Sekampung).

5. Nelayan Kecil

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dan binatang air lainnya atau tanaman air.

Nelayan yang dimaksud adalah nelayan kecil yang dimana sehari-hari melakukan penangkapan ikan dengan kapal yang berukuran lima groos ton (5 GT) kebawah.

6. Nelayan Pemilik

Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan. Nelayan pemilik merupakan nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif lebih dari 10 GT sampai dengan 60 GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

7. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, seperti kapal penangkap ikan, alat pengkapan ikan, bahan bakar minyak dan sumber energy lainnya.

8. Prasarana

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, seperti pelabuhan perikanan, jaringan listrik, stasiun pengisian bahan bakar dan sebagainya.

9. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan

Peran pemerintah dalam pemberdayaan adalah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Regulator adalah pemerintah sebagai pembuatan peraturan, dinamisator adalah pemerintah melakukan pengarahannya dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, fasilitator adalah pemerintah melakukan pelatihan, peningkatan keterampilan, memberikan bantuan dana serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

10. Bimbingan dan Bantuan Teknis

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan. Bantuan teknis adalah bantuan yang diberikan berupa modal, sarana dan prasarana dan sebagainya.

11. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Menggerakkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengontrol pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

12. Memberikan Stimulasi dan Memotivasi Masyarakat

Memberikan stimulasi dan memotivasi masyarakat adalah pemerintah langsung turun kelapangan dengan berdialog kepada masyarakat serta memotivasi masyarakat agar selalu semangat untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dialami oleh masyarakat.

13. Ikut Serta Masyarakat Untuk Memilih dan Mengambil Keputusan

Ikut serta masyarakat untuk memilih dan mengambil keputusan adalah masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan ide dan gagasan serta memilih pilihan yang terbaik mengenai tantangan dan hambatan yang dialami oleh masyarakat.

E. Operasional Variabel

Adapun operasional variable dalam penelitian mengenai Peran Dinas perikanan Kabupaten Bengkalis dalam Pemberdayaan Nelayan Kecamatan Bengkalis (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Sekampung), pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran pemerintah dalam meningkatkan kekuasaan bersifat regulasi, dinamis, dan regulasi. Koordinator berarti membuat pengaturan yang relevan, dinamis berarti memberikan arahan dengan memberikan informasi, dan regulator berarti menciptakan lingkungan yang	Peran Pemerintah	a) Bimbingan dan Bantuan Teknis	a) Bimbingan yang telah dilakukan b) Bantuan sarana dan prasarana yang telah diberikan
		b) Menggerakkan Partisipasi Masyarakat	a) Adanya penyuluhan b) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan
		c) Stimulasi dan Motivasi Kepada Masyarakat	a) Adanya pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat b) Keluhan masyarakat terhadap kegiatan
		d) Ikut Serta	a) Perumusan

menguntungkan untuk menghubungkan kepentingan publik. (Moldjo dkk, 2021:2).		Masyarakat Untuk memilih dan Mengambil Keputusan	kebijakan melibatkan masyarakat b) Kesesuaian kegiatan dengan harapan masyarakat
---	--	--	---



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sidiq dan Choiri (2019;4) Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode deskriptif menurut Purnia dkk (2020;85) adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini dilakukan untuk mengadakan akumulasi data dasar belaka.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas perikanan Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena adanya program pemberdayaan bagi nelayan di Kabupaten Bengkalis, namun belum seluruhnya tugas pokok dan fungsi dilaksanakan, serta pemberdayaan yang dilakukan belum merata, sehingga masih ada kelompok nelayan yang belum terkena pemberdayaan.

C. Teknik Penarikan Informan

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Sedangkan key informan atau informan utama/kunci adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Bungin, 2007;78). Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Bungin, 2011;78). Dengan demikian, penulis hanya mengambil beberapa orang saja yaitu pada informan yang memiliki informasi tentang permasalahan yang peneliti angkat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang di peroleh langsung dari hasil angket dan wawancara yang telah ditetapkan dalam Peran Dinas perikanan Kabupaten Bengkalis dalam Pemberdayaan Nelayan Kecamatan Bengkalis (Studi Kasus Kelurahan Rimba Sekampung) yang terdiri dari :
 - a. Identitas Responden
 - b. Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, melalui dokumen, monografi, buku-buku dan hasil penelitian lainnya. Sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dimana data tersebut adalah :

- a. Data tentang gambaran umum Kabupaten Bengkalis
- b. Data tentang pokok, jumlah dan komposisi pegawai kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Peneliti melakukan pertemuan dan wawancara tanya jawab dengan para informan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pembahasan penelitian ini yang disusun berdasarkan kepentingan masalah ini.

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah metode wawancara bertahap, metode wawancara ini dilaksanakan secara bebas dan juga mendalam, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara (Bungin, 2007;111).

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung tentang bagaimana Peran Dinas perikanan dalam Pemberdayaan Nelayan Kecamatan Bengkalis (Studi Kasus Kelurahan Rimba Sekampung).

Tipe Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe observasi partisipatif, yakni tipe observasi dengan penulis ikut merasakan secara langsung bagaimana kondisi objek pengamatan. Dalam penelitian ini penulis ikut secara langsung dalam merasakan bagaimana pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas perikanan Kabupaten Bengkalis bagi para nelayan (Bungin, 2007;118-119).

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-laporan, jurnal, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012;317)

F. Informan dan Key Informan

Menurut Bungin (2007;78) Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi terkait objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Sedangkan key informan atau informan/kunci menurut Wasito (1995;88) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data yang dilakukan terhadap beberapa informasi dan key informasi yakni :

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Ir. H. Herliawan, M.Si	Kepala Dinas Perikanan	Key Informan
2	Muchlizar, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan	Informan
3	Rusli	Ketua Kelompok Nelayan	Informan
4	Masyarakat	Nelayan	Informan

G. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, dengan data yang telah dikumpulkan dianalisis dalam bentuk lisan atau tulisan yaitu menggunakan metode analisis bingkai, yakni teknik analisa data dengan melihat dan menemukan *frame* yaitu suatu perspektif untuk melihat sebuah perspektif yang digunakan dalam pengamatan, analisis, dan interpretasi terhadap sebuah realitas social di masyarakat.

Menurut Entman, analisis bingkai memiliki empat cara yaitu (1) mengidentifikasi masalah, (2) mengidentifikasi penyebab masalah, (3) melakukan

evaluasi moral, (4) melakukan saran pananggulangan masalah (Bungin, 2007;168).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari hasil penelitian yang akan dilakukan penulis bab demi bab secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini diceritakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Gambaran umum objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mendesripsikan hasil penelitian, dan membahas hasil penelitian berdasarkan metode dan teori yang relevan.

BAB VI : PENUTUP

Kesimpulan dan saran.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Kabupaten Bengkalis



Gambar IV.1 Lambang Kabupaten Bengkalis

Sumber : Google Images, 2022

Asal usul nama Bengkalis diambil dari kata “mangkal” yang berarti sedih atau sebak dan “kalis” yang berarti tabah, sabar dan tahan ujian kata ini diambil dari ungkapan raja kecil kepada pembantu dan pengikutnya sewaktu baginda sampai di pulau Bengkalis ketika ingin merebut tahta kerajaan Johor. Dengan ungkapan “Mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai Sultan yang memerintah negeri, namun tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima keadaan ini” sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda sedang mengkal tapi masih kalis akhirnya ungkapan itu menjadi perkataan “oh baginda sedang Mangkalis” dari kisah ini muncul kata mangkalis, bahkan berubah menjadi Bengkalis.

Sejarah Bengkalis bermula ketika Tuan Bujang alias Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah mendarat di Bengkalis pada tahun 1722. Beliau di sambut oleh Batin Senggoro dan beberapa Batin pucuk suku “asli” Batin Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dan lain-lain. Berita Raja Kecil adalah pewaris kerajaan Johor semakin menumbuhkan rasa hormat Batin-Batin di maksud, sehingga mereka mengusulkan agar Raja Kecil membangunkan kerajaannya di pulau Bengkalis. Bengkalis merupakan Kabupaten dengan julukan Negeri Junjungan, pusat kota terletak di Kecamatan Bengkalis terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Minang dengan mayoritas penduduknya adalah Melayu.

Adapun kedatangan Raja Kecil beserta pembantu dan pengikutnya disambut oleh Batin Senggoro, Batin Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dan lain-lain. Raja Kecil adalah pewaris Raja Johor, sehingga membuat batin-batin tersebut lebih hormat dan mereka mengusulkan agar Raja Kecil membangunkan kerajaannya di pulau Bengkalis. Namun melalui musyawarah beliyau dengan Datuk Laksemana Bukit Batu, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh dan Datuk Kampar dan para Batin, di sepakati bahwa pusat kerajaan didirikan di dekat Sabak Aur yakni di sungai Buantan salah satu anak Sungai Siak, pusat kerajaan itu didirikan pada tahun 1723. Kerajaan inilah kemudian berkembang menjadi kerajaan Siak Sri Indra Pura, yang pernah menguasai kawasan yang luas di pesisir

pantai Sumatra bagian utara dan tengah sampai ke perbatasan Aceh.

Catatan sejarah menunjukkan, bahwa Bengkalis pernah menjadi basis awal kerajaan Siak. Di Bengkalislah wawasan mendirikan kerajaan Siak di

mufakati. Dan di Bengkalis pula bantuan moral dari rakyat di padukan ketika beliau keluar dari Bintan. Sejarah juga mencatat, setelah belanda semakin berkuasa. Maka Bengkalis pula yang menjadi tempat kedudukan residen pesisir timur pulau Sumatra berdasarkan perjanjian dengan Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syarifudin menyerahkan pulau bengkalis kepada Hindia Belanda tanggal 26 Juli 1823.

Sejarah juga mencatat sebelum kedatangan Raja Kecil, Bengkalis sudah menunjukkan peran penting dalam arus lalu lintas niaga di selat Melaka. Terutama sebagai persinggahan saudagar yang keluar masuk sungai Siak. Bahkan sejak Tapung (Petapahan) di temui timah (1674) dan emas. peran Bengkalis dalam hubungan Melaka dengan kerajaan di pesisir timur Sumatra semakin besar, terutama dimasa berdirinya kerajaan Gasib. Di masa pemerintahan Sultan Mansur Syah tahun (1459-1477) Gasib di kuasai oleh Melaka, raja Gasib yang belum menganut agama Islam di Islamkan dan di beri gelar Sultan " Ibrahim" dan di jadikan wakil Sultan Melaka di Gasib, sejak itu kerajaan Gasib di bawah kepemimpinan Sultan Ibrahim (Sebelum di Islamkan bernama Megat Kudu) menjadi kawasan pengembangan Islam.

2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956) dengan ibu kotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak,

dan Kabupaten Rokan Hilir. Pada awal tahun 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11 Kecamatan, 19 Kelurahan, dan 136 Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km². Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 sebanyak 553.938 jiwa yang terdiri dari 284.262 laki-laki (51,32 persen) dan 269.676 perempuan (48,68 persen).

Penduduk Kabupaten Bengkalis sangat heterogen dengan mayoritas beragama islam. Selain suku Melayu yang merupakan suku mayoritas, penduduk Kabupaten Bengkalis berasal dari berbagai suku bangsa, seperti Aceh, Banjar, Batak, Bugis, Jawa, Minang, Sunda dan Tionghoa.

3. Geografis Kabupaten Bengkalis

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2o7'37,2"-0o55'33,6" Lintang Utara dan 100o57'57,6"-102o30'25,2" Bujur timur. Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang + 446 Km yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai.

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Melaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, berada di tepi jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia, yakni Selat Malaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik.

Adapun kecamatan dan jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

Tabel IV.1 Nama Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	514,00
2	Bantan	Selat Baru	424,00
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	488,00
4	Mandau	Air Jamban	180,00
5	Rupat	Batu Panjang	896,35
6	Rupat Utara	Tanjung Medang	628,50
7	Siak Kecil	Lubuk Muda	742,21

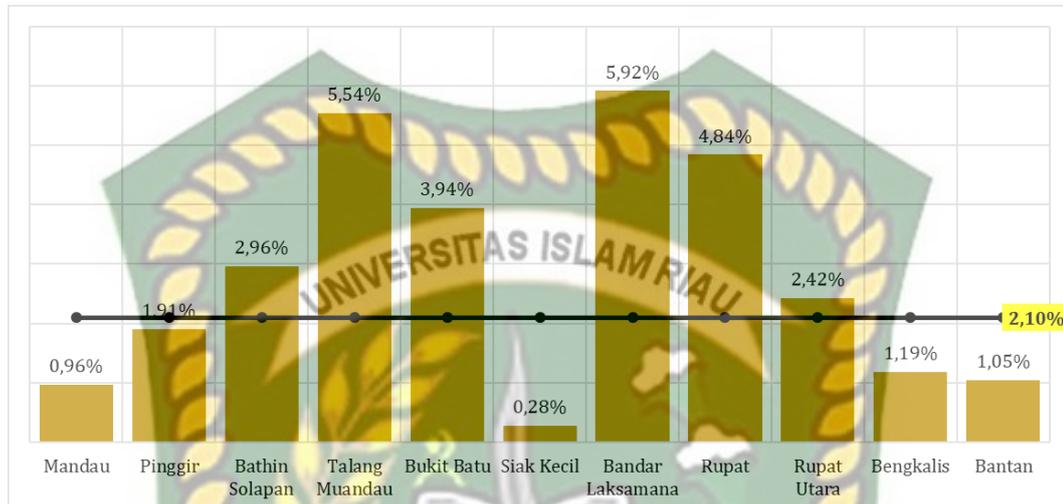
8	Pinggir	Pinggir	1.332,00
9	Bandar Laksamana	Tenggayun	640,00
10	Talang Muandau	Beringin	1.171,00
11	Bathin Solapan	Sebangar	757,47

4. Kondisi Demografi

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mencapai 67,12 jiwa per Km². Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penambahan jumlah penduduk akibat berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pertambahan penduduk setiap tahun di Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan yang meningkat. Pada tahun 2016 pertambahan penduduk sebesar 1,63% kemudian pada tahun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 meningkat menjadi 1,80% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,1% per tahun. Letak wilayah Kabupaten Bengkalis pada jalur lintas Sumatera dan pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis yang terbuka bagi daerah lain menjadi salah satu penyebab pertambahan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk pada setiap Kecamatan Kabupaten Bengkalis tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis dari

tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 2,10% per tahun,



Sumber : Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2021

Gambar IV.2 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2020.

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pada beberapa kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik

investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif penambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

B. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis



Sumber : Google Maps Peta Kabupaten Bengkalis, 2022

Gambar IV.3 Lokasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai Instansi Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab kepada bupati selaku kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis bertugas mengemban peningkatan pembangunan masyarakat di sektor perikanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah diatur kembali dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 84 tahun 2019.

2. Visi dan Misi

a) Visi

“Terwujudnya Perikanan Bengkalis yang Tangguh dan Lestari”

Visi ini merupakan cara pandang jauh kedepan kearah mana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis akan diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis secara terus menerus mengembangkan peranan dan fungsinya agar tetap eksis dan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dengan tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan stabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Penjabaran formulasi visi pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Perikanan yang tangguh, berarti produk perikanan mampu menghasilkan produksi yang kontinyu, berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif, dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat perikanan serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

2. Perikanan yang lestari, artinya pembangunan perikanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya manusia dan sumberdaya alam sehingga potensi perikanan mampu bertahan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumber daya terbarukan.

b) Misi

1. Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera.
2. Mewujudkan ketersediaan pangan sumberdaya perikanan.
3. Mewujudkan sistim manajemen dan pemerintahan yang baik.

3. Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Otonomi Daerah, membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

4. Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perumusan bahan kebijakan managerial dan teknis dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan, dan bidang pelayanan usaha perikanan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dibidang sekretariat, bidang budiaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan dan bidang pelayanan usaha perikanan.
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan, dan bidang pelayanan usaha perikanan.
4. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan/petani ikan.
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

5. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Urutan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, terdiri dari :

8. Kepala Dinas
9. Sekretariat, terdiri dari :
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian.
 - d. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
10. Bidang Pemberdayaan Perikanan, terdiri dari :
 - d. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- e. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan.
- f. Seksi Pembinaan Kelembagaan.

11. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan, terdiri dari :

- d. Seksi Perizinan.
- e. Seksi Pencatatan Usaha Perikanan.
- f. Seksi Produksi Perikanan.

12. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :

- d. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
- e. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- f. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya.

13. Unit Pelaksana Teknis, dan

14. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 84 Tahun 2019, tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

a) Sekretariat;

Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan sekretariatan yang meliputi tugas pengkoordinasian,

perencanaan, penyusunan program, umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga;
3. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan penataan aset;
4. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
5. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
6. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

b) Uraian Tugas Bidang Pemberdayaan Perikanan;

Bidang Pemberdayaan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan perikanan. Untuk pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan dibidang pemberdayaan perikanan;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perikanan dalam pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, petunjuk teknis, dan kriteria dibidang pemberdayaan perikanan meliputi pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan;

4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perikanan meliputi pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang memberi oleh Kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Perikanan dibantu oleh :

1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;
2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan; dan
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan.

c) Uraian Tugas Bidang Pelayanan Usaha Perikanan

Bidang Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian, pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan usaha perikanan. Untuk pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program dibidang pelayanan usaha perikanan;
2. Penyusunan petunjuk teknis dibidang pelayanan usaha perikanan;
3. Pelaksanaan survey dan pelaksanaan teknis program dibidang pelayanan usaha perikanan yang meliputi perizinan, pencacatan usaha perikanan dan produksi perikanan tangkap;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan, pencacatan usaha perikanan dan produksi perikanan tangkap; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Perikanan dibantu oleh :

1. Seksi Perizinan;
2. Seksi Pencacatan Usaha Perikanan;
3. Seksi Produksi Perikanan Tangkap.

d) Uraian Tugas Bidang Budidaya Perikanan

Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang budidaya perikanan yang meliputi sarana prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembenihan dan produksi budidaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pelaksanaan tugas Bidang Budidaya Perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program dibidang budidaya perikanan;
2. Penyusunan petunjuk teknis dibidang budidaya perikanan;

3. Pelaksanaan survey dan perencanaan teknis dibidang budidaya perikanan yang meliputi; sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, pembenihan dan produksi budidaya;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang budidaya perikanan yang meliputi ; sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, pembenihan dan produksi budidaya;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Budidaya Perikanan dibantu oleh :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
3. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya.

7. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Jumlah seluruh pegawai yang bertugas pada lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 54 orang dengan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 Data Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Begnkalis

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TEKNIS	NON TEKNIS
1.	S2	5	-
2.	S1	18	8
3.	D3	-	1
4.	SLTA	2	18
5.	SLTP	-	1
6.	SD	-	-
J U M L A H		25	30

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2022

Berdasarkan jabatan atau eselon, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai pegawai sebanyak 22 orang, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.3 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jabatan

NO	ESSELONERING	JUMLAH TERSEDIA (ORANG)	JABATAN TERISI (ORANG)	JABATAN BELUM TERISI (ORANG)
1.	Esselon II/a	-	-	-
2.	Esselon II/b	1	1	-
3.	Esselon III/a	1	1	-
4.	Esselon III/b	3	3	-
5.	Esselon IV/a	11	10	1
6.	Esselon IV/b	6	6	-
J U M L A H		22	21	1

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2022

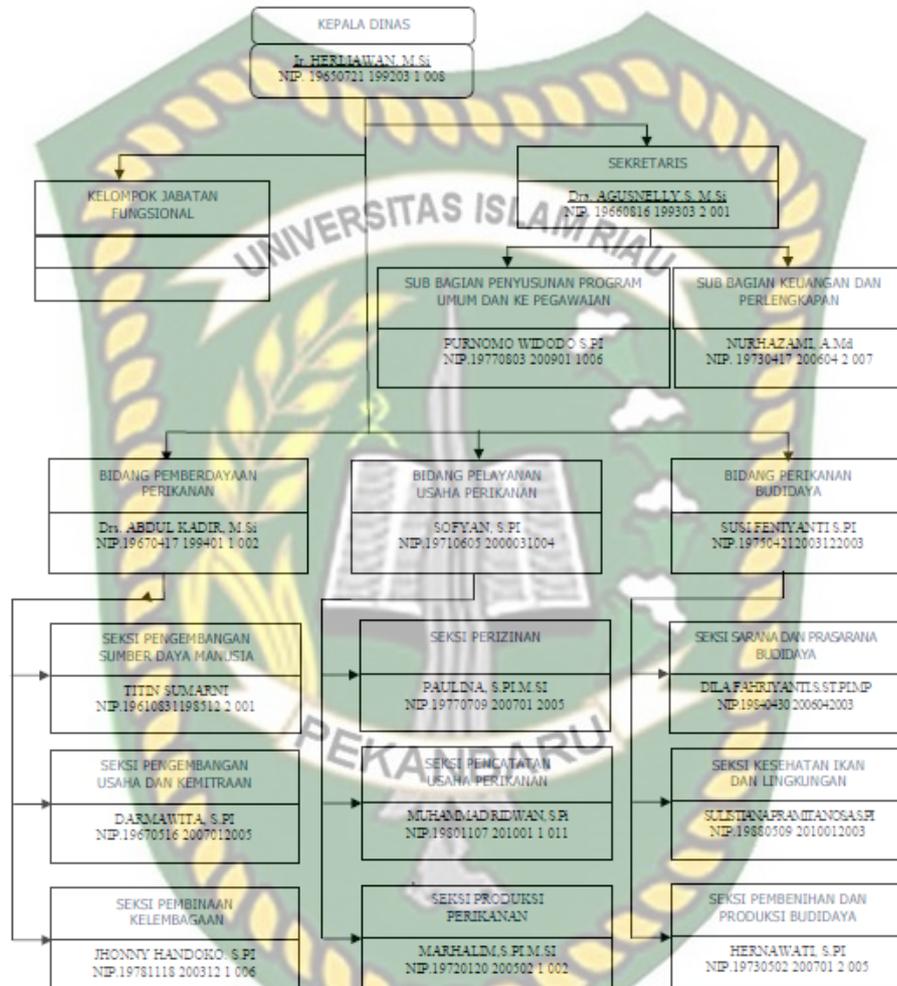
Sedangkan menurut golongan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai pegawai sebanyak 53 orang, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.4 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan I	1	-
2.	Golongan II	16	-
3.	Golongan III	29	-
4.	Golongan IV	7	-
J U M L A H		53	-

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2022

8. Bagan Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2022

Gambar IV.4 Bagan Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh langsung dari informan berupa data wawancara, dokumentasi, observasi dan lainnya. Adapun identitas informan peneliti paparkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan masyarakat.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.I Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	6
2	Perempuan	-
Jumlah		6

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah informan laki-laki sebanyak 6 orang.

2. Tingkat Pendidikan

Data informan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	
2.	SLTP	3
3.	SLTA	1
4.	Lainnya	2

Sumber : Hasil Olahan Data Tahun 2022

3. Usia Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di ajukan kepada 6 orang informan, maka dapat diketahui usia para informan tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 Kelompok Usia Informan

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	20-30	1
2	31-40	1
3	41-50	3
4	>51	1

Sumber : Hasil Penelitian, 2022

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 orang informan, jumlah informan yang usia 20-30 sebanyak 1 orang, usia 31-40 sebanyak 1 orang, usia 41-50 sebanyak 3 orang dan usian diatas 51 sebanyak 2 orang.

4. Nama dan Identitas Informan

Tabel V.4 Nama dan Identitas Informan

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenjang Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Kelamin
1	Ir.H. Herliawan, M.Si	57	S2	PNS	Laki-Laki
2	Muchlizar, S.Pi., M.Si	47	S1	PNS	Laki-Laki
3	M. Syahbani	22	SLTA	Mahasiswa	Laki-Laki
4	Rusli	54	SLTA	Nelayan	Laki-Laki
5	Abdul Hamid	62	SLTP	Nelayan	Laki-Laki
6	Ahmad	50	SLTA	Nelayan	Laki-Laki

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2022

B. Hasil Analisis dan Pembahasan Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.

Hasil penelitian ini berisikan hasil wawancara dari informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, serta beberapa nelayan di kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis. Hasil penelitian ini berdasarkan empat indikator yang terdiri dari memberikan bimbingan dan bantuan teknis, menggerakkan partisipasi masyarakat, memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat serta ikut serta masyarakat untuk memilih dan mengambil keputusan.

Pemerintah dalam fungsi pemberdayaan adalah sebagai sebuah fasilitator yang dilakukan dengan terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian social, ekonomi, dan politik di masyarakat. Dimana dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Dengan berperannya pemerintah diharapkan dapat membantu, mengembangkan, serta memberi pemberdayaan sehingga hasil yang di peroleh mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah dan masyarakat harus saling berkolaborasi demi tercapainya kesejahteraan di masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat terdiri dari 3 aspek yaitu : pertama menciptakan lingkungan yang bisa membuat

masyarakat menjadi berkembang (*enabling*). Kedua, meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat (*empowering*). Ketiga, adanya aksi dan langkah yang nyata serta melihat berbagai peluang yang ada (*opportunities*).

Fungsi pemberdayaan tersebut memberikan peran penting yang bisa dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk memberdayakan masyarakat nelayan, yang berguna sebagai meningkatkan perekonomian masyarakat dan menggali potensi yang terdapat di suatu daerah.

Salah satu masyarakat nelayan yang perlu diberdayakan berada di Kelurahan Rimba Sekampung Kabupaten Bengkalis. Daerah ini banyak memiliki potensi alam untuk dikembangkan, untuk memaksimalkan potensi yang ada perlu adanya pemberdayaan yang mengarah kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, serta akses permodalan.

Sebagai Dinas yang mengurus masalah perairan, peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki andil yang sangat penting dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan demi tercapainya kesejahteraan ekonomi di masyarakat nelayan itu sendiri.

Dengan demikian pada penelitian mengenai Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis, maka ditetapkan beberapa indikator pemberdayaan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan membuktikan fenomena yang telah ditemukan. Adapun analisis dan pembahasan setiap indikator penelitian sebagai berikut :

1. Bimbingan dan Bantuan Teknis

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan yang diperlukan untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan. Dengan demikian, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada para nelayan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan nelayan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan teknis adalah Bantuan diberikan berupa modal, sarana dan prasarana dan sebagainya.

A. Memberikan bimbingan untuk pengembangan serta peningkatan kapasitas nelayan.

Penulis Melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengenai Bimbingan, beliau menjelaskan :

“Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah berpindah fungsi ke Perairan Umum Daratan (PUD), seperti sungai, danau, tasik, ketika pemerintah mau memberikan bimbingan atau pembinaan, sudah tidak bisa lagi dasarnya permendagri nomor 90 tahun 2019, setiap kita mau menganggarkan tidak akan muncul di SIPD karena itu sudah tidak menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, mungkin bisa kami berikan bimbingan cuman terbatas.” (Wawancara, 21 Februari 2022)

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan dengan indikator bimbingan, Beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk bimbingan itu ada, kami merekrut dan bekerja sama dengan para alumni lulusan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), nah mereka itu yang melakukan sosialisasi terkait program dari pemerintah, aturan-aturan yang berlaku dan sebagainya kepada nelayan di wilayah kerja binaan, selain tenaga pendamping yang direkrut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, ada juga pendamping desa yang di rekrut oleh pemerintah pusat. Untuk bantuan itu dulu

ada kami berikan, berupa jaring, kapal dan lain-lain, dalam memberikan bantuan, ada klasifikasi nelayan yang diberikan bantuan yaitu sudah terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, harus memiliki dokumen dan ada beberapa klasifikasi yang lainnya. Untuk diketahui, mulai tahun ini Dinas Perikanan tidak lagi mengurus masalah kelautan, ini karena adanya aturan baru dari menteri dalam negeri, jadi sekarang ini kami hanya mengurus masalah yang ada di sungai, danau, waduk, serta perairan yang ada di daratan.. (Wawancara, 21 Februari 2022)

Kemudian penulis melakukan wawancara bersama nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung adalah sebagai berikut :

“bimbingan itu ada, kadang datang semacam penyuluh, itupun hanya sesekali datang ke lapangan, mereka memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengolah ikan, sosialisasi tentang program dari pemerintah, mendata jumlah nelayan dan sebagainya.” (Wawancara, 27 Februari 2022)

Dari hasil wawancara dengan beberapa sumber, penulis mengamati bahwa dalam hal memberikan bimbingan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memberikan bimbingan berupa pengembangan dari Sumber Daya manusia (SDM) dari nelayan itu, sosialisasi program dari pemerintah seperti peluncuran kartu pelaku usaha perikanan (KUSUKA), memberikan informasi aturan-aturan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan dan sebagainya. Program ini dilakukan secara bergantian setiap satu tahun satu desa. Dengan adanya program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nelayan saat melaut.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 27 Februari 2022, penulis mengamati bahwa tidak ada bentuk bimbingan yang telah diberikan kepada nelayan berupa sosialisasi. Ini dikarenakan daerah Kelurahan Rimba Sekampung sudah mendapatkan bimbingan dari pemerintah pada tahun 2018.

B. Bantuan teknis untuk sarana dan prasarana nelayan

Bantuan teknis adalah Bantuan diberikan berupa modal, sarana dan prasarana dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis tentang memberikan bantuan teknis, beliau menjelaskan :

“Untuk bantuan itu dulu ada kami berikan, berupa jaring, kapal dan lain-lain, dalam memberikan bantuan, ada klasifikasi nelayan yang diberikan bantuan yaitu sudah terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, harus memiliki dokumen dan ada beberapa klasifikasi yang lainnya. Untuk diketahui, mulai tahun ini Dinas Perikanan tidak lagi mengurus masalah kelautan, ini karena adanya aturan baru dari menteri dalam negeri, prioritas kami sekarang tidak lagi kepada nelayan, namun kepada pembudi daya ikan atau yang lainnya, yang penting perairan umum daratan, jadi sekarang ini kami hanya mengurus masalah yang ada di sungai, danau, waduk, serta perairan yang ada di daratan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan nelayan mengenai bantuan yang telah diberikan kepada nelayan, mereka menjelaskan :

“Kalau bantuan dari dinas, mereka memberikan kami jaring, tapi sudah lama bantuan itu diberikan, seperti jaring yang kami gunakan jaring sering sangkut dan rusak, kalau jaring sudah rusak kami memperbaiki sendiri dengan menggunakan dana pribadi.” (Wawancara, 27 Februari 2022)

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 27 Februari 2022, terlihat ada bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis seperti jaring untuk penangkapan ikan, serta ada beberapa kapal nelayan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Hal ini tentunya sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan Kabupaten Bengkalis mengenai bantuan sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

kepada nelayan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu nelayan dalam menangkap ikan di laut.

2. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Menggerakkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengontrol pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki apa saja yang kurang dari program yang telah dibuat oleh pemerintah. Menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis telah menggerakkan partisipasi masyarakat nelayan dengan merekrut tenaga ahli dan tenaga penyuluh untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan perikanan.

A. Memberikan penyuluhan kepada nelayan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan mengenai penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis kepada nelayan adalah sebagai berikut :

“Ada, melalui tenaga penyuluh, kami merekrut orang-orang yang lulusan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), lalu tenaga ahli baik itu dari UNRI yang penting sarjana perikanan, mereka bertugas untuk menyampaikan informasi, aturan-aturan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perikanan. Kami memberikan informasi seputar perikanan kemudian memberikan penyuluhan kepada para nelayan berupa sosialisasi dan informasi kepada nelayan, sekarang ini sudah ada kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Perikanan) kalau dulu namanya kartu nelayan, selain itu kami memberikan penyuluhan berupa bagaimana cara penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya”. (Wawancara, 21 Februari 2022)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan nelayan yang ada di Kelurahan Rimba Sekampung mengenai penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, mereka menjelaskan :

“Tidak ada penyuluhan dari pemerintah, penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah lama dilakukan, itu sekitar tahun 2019, kalau sekarang ini belum ada datang tenaga penyuluh dari pemerintah.” (Wawancara, 27 Februari 2022)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, beliau menjelaskan bahwa sudah ada usaha pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada nelayan. Adapun program yang dibuat oleh pemerintah pada tahun anggaran 2020 yaitu seperti peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat perikanan, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia perikanan serta pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat kelautan dan perikanan. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan, penulis mengamati bahwa tidak ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah berusaha dalam melakukan pemberdayaan kepada nelayan, tetapi untuk di Kelurahan Rimba Sekampung dilakukan pemberdayaan yang bersifat sementara, belum dilakukan pemberdayaan secara berkelanjutan,

B. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah, penulis melakukan wawancara bersama salah satu

nelayan yang ada di Kelurahan Rimba Sekampung, berikut hasil wawancara penulis dengan nelayan :

“Partisipasi masyarakat disini biasa saja, kalau ada sosialisasi di daerah ini, kami setiap ketua kelompok nelayan mengikutinya seperti sosialisasi tentang peluncuran kartu nelayan, teknologi penangkapan perikanan modern dan sebagainya.”(Wawancara, 27 Februari 2022)

3. Stimulasi dan Motivasi Kepada Masyarakat

Memberikan stimulasi dan memotivasi masyarakat adalah pemerintah langsung turun kelapangan dengan berdialog kepada masyarakat serta memotivasi masyarakat agar selalu semangat untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dialami oleh masyarakat. Stimulasi dan motivasi bertujuan agar nelayan mampu menghadapi tantangan dan hambatan serta nelayan lebih bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis telah membuat program pembinaan seperti pembinaan kelembagaan, kemudian setelah itu setiap kelembagaan di pantau serta dilakukan evaluasi.

A. Adanya pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan mengenai pertemuan pemerintah dengan masyarakat :

“Jelas ada, kami melakukan pembinaan kelompok nelayan, kami juga menemui nelayan untuk mencatat dan mendata nelayan yang ada disana, apabila sudah terdaftar barulah para nelayan dapat pelayanan dan bantuan dari pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, setelah terbentuk kelompok nelayan kami kukuhkan, kemudian kami lakukan sosialisasi kepada kelompok nelayan tersebut”. (Wawancara, 21 Februari 2022)

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu nelayan yang ada di Kelurahan Rimba Sekampung sebagai berikut :

“Pada tahun 2020 dulu ada datang, Pemerintah Daerah bersama penyuluh melakukan pendataan dan pencatatan jumlah nelayan, mereka lebih banyak melakukan sosialisasi.” (Wawancara, 27 Februari 2022)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam hal untuk stimulasi dan motivasi kepada nelayan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis melakukan kegiatan melalui Tenaga penyuluh berupa sosialisasi tentang perikanan, kemudia tenaga penyulu berdialog bersama nelayan tentang hambatan yang dialami oleh nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, tidak ada kegiatan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.

B. Keluhan Masyarakat terhadap kegiatan

Berikut penulis melakukan wawancara dengan nelayan yang ada di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis :

“Keluhan kami sebagai nelayan disini seperti program bantuan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan tidak sesuai dengan harapan nelayan, seperti bantuan jaring yang diberikan oleh pemerintah, jaring ini tidak bertahan lama, karena disaat kami melaut ada saja halangan nya, terkadang jaring kami mengenai terumbu karang lalu putus dan sebagainya, kemudian kami disini sangat membutuhkan kapal untuk melaut.” (Wawancara 27 Februari 2022)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan dan nelayan yang ada di Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis, penulis

menyimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah berperan dalam pemberdayaan dalam hal memberikan stimulasi dan motivasi masyarakat. Hal ini tentu saja memberi harapan kepada nelayan bahwa mereka masih diperhatikan oleh pemerintah.

4. Ikut Serta Masyarakat Untuk Memilih dan Mengambil Keputusan

Ikut serta masyarakat untuk memilih dan mengambil keputusan adalah masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan ide dan gagasan serta memilih pilihan yang terbaik mengenai tantangan dan hambatan yang dialami oleh masyarakat. Untuk hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memberikan kesempatan kepada nelayan untuk menyampaikan aspirasi nya dalam mengatasi hambatan dan tantangan nya dalam menangkap ikan di laut. Melalui aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, tentu saja pemerintah sebagai fungsi regulator bisa menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah untuk membuat kebijakan.

A. Membuat perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan dalam hal perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat nelayan sebagai berikut :

“Jelas, kami membuat program dengan mendengarkan keluhan dari masyarakat, baik itu disampaikan melalui desa dan sebagainya, setelah itu kami melakukan inovasi, serta program-program terbaru. Tapi sudah ada UU No 7 Tahun 2016 Tentang pemberdayaan nelayan. Sudah semestinya dalam membuat program itu kita mendengarkan keluhan dari nelayan itu sendiri, seperti contoh kami membuat program kartu pelaku usaha perikanan, apabila nelayan memiliki kartu ini, maka nelayan tersebut masuk kedalam kategori nelayan yang di berikan pemberdayaan”. (Wawancara, 21 Februari 2022)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara bersama nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung adalah sebagai berikut :

“Sudah kami sampaikan kepada pemerintah, setelah kami sampaikan tapi begitu-gitu saja, saya sudah dari tahun 1980-an menjadi nelayan, beginilah nasib kami yang hanya dapat untuk makan sehari-hari saja sudah cukup”. (Wawancara, 27 Februari 2022)

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat nelayan untuk menyampaikan aspirasinya, namun masih kurangnya implementasi program yang telah diusulkan oleh para nelayan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Untuk nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis mereka masih belum merasakan program yang telah diusulkan oleh para nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.

B. Kesesuaian kegiatan dengan harapan masyarakat nelayan

Berikut penulis melakukan wawancara bersama salah satu nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis :

“Untuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis masih belum sesuai dengan harapan nelayan disini, kami ingin program-program yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan berkepanjangan, jangan hanya sekali-kali saja. Nelayan disini setiap melaut pasti ada kendalanya, seperti contoh kapal bocor, kami memperbaikinya dengan menggunakan dana pribadi.” (Wawancara, 27 Februari 2022)

Berdasarkan analisis diatas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis tidak memiliki kewenangan lagi untuk menganggarkan program-program untuk membantu para nelayan. Seperti pemberian bantuan jaring kepada nelayan dapat dikatakan sekali saja diberikan, tidak berkelanjutan. Selanjutnya menggerakkan

partisipasi masyarakat sudah dilakukan pemerintah dengan bekerja sama dengan tenaga ahli lulusan sarjana perikanan. Berikutnya stimulasi dan motivasi kepada masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Serta ikut serta masyarakat dalam memilih dan mengambil keputusan hanya sebatas dialog penyampaian aspirasi.

Menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sudah menjadi urusan pemerintahan provinsi yang dimana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil sudah menjadi tanggung jawab pemerintahan provinsi. Sedangkan pemerintah daerah mempunyai wewenang pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.

C. Faktor Penghambat Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan Kabupaten Bengkalis, di dapatkan beberapa faktor-faktor penghambat pemberdayaan nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis ini berdasarkan hasil dari pengamatan dan wawancara yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

“Wilayah bengkalis ini merupakan wilayah pesisir, sudah tentu memiliki potensi sumberdaya alam yang bagus, kemudian dengan wilayah pesisir ini banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Namun sumber daya manusia yang kita miliki masih kurang secara kualitas, hal ini dapat kita maklumi, dikarenakan beberapa nelayan hanya lulusan SMA atau SMP, kemudian kami dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku, seperti permendagri nomor 90 tahun 2019, tugas dan fungsi Dinas Perikanan sudah berbeda.” (Wawancara, 21 Februari 2022)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam proses pemberdayaan terhadap nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki anggaran untuk melakukan pemberdayaan kepada nelayan, baik itu berupa bantuan sarana dan prasarana, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya, namun terhalang oleh regulasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki hambatan yaitu dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari nelayan itu sendiri, yang dimana

nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung lebih memilih untuk menggunakan cara penangkapan ikan dengan menggunakan cara yang tradisional, hal ini disebabkan karena budaya dan kearifan lokal nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung masih sangat kuat.

3. Tidak adanya pembuatan kelembagaan di masyarakat nelayan, karena nelayan lebih memilih untuk bekerja secara sendiri-sendiri.

Faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebab kurangnya peranan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis, sehingga pemberdayaan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan maksimal.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pemberdayaan sudah membuat program seperti memberikan bimbingan dan bantuan teknis, memberikan sosialisasi, menerbitkan kartu pelaku usaha perikanan (KUSUKA), serta memberikan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM).
2. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki hambatan yaitu dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari nelayan itu sendiri, yang dimana nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung lebih memilih untuk menggunakan cara penangkapan ikan dengan menggunakan cara yang tradisional, hal ini disebabkan karena budaya dan kearifan lokal nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung masih sangat kuat.

B. Saran

1. Diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam menyampaikan permasalahan nelayan di kabupaten.
2. Diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk selalu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada nelayan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk mensosialisasi dan mendorong betapa penting terbentuknya kelembagaan di masyarakat nelayan untuk wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar-menukar informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat nelayan.
4. Untuk nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis untuk lebih partisipatif dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah dan selalu aktif dalam menyampaikan pandangan-pandangan terhadap pemberdayaan nelayan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* : Yogyakarta. Penerbit Gava Media 15.

Fauzi, Akhmad. 2010. *Ekonomi Perikanan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.

Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

Kusnadi, M.A. 2002. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta : LKIS

Handyaningrat, Soewarna. 1984. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Gunung Agung.

Soekanto, Soejono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara

Satria, Arif. 2010. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta : Printing Cemerlang.

Totok dan Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada

Abdullah, Rozali. 2005. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Rahyunir, Rauf. 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh

Nyoman, Sumaryadi I. 2010. *Sosiologi Pemerintahan; dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Sri, Maulidiah. 2014. *Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung : Indra Prahasta

Taliziduhu Ndraha. 1997. *Ilmu Pemerintahan (Kybernologi)*. Jakarta : Rineka Cipta

Edi, Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama

Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung : Humaniora

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Anastesinya ?*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Loekman Soetrisno. 2005. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta : Kamisius Silalahi.

Pramono, Djoko. 2005. *Budaya Bahari*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum

Kusnadi. 2007. *Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung : Humaniora

Jurnal

Riri Moldjo dkk. 2021. Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut. *Jurnal Politik*. Vol 10 (4).

Rosni, 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*. Vol 9 (1).

- Susilawati, 2019. Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. Vol 8 (1).
- Budiyono dkk, 2015. Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 17 (3).
- Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si. 2017. Hakekat Organisasi Perangkat Daerah. *Ilmu Pemerintahan*. Vol 3 (2).
- Dudung Abdullah. 2016. Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum*. Vol 1 (1).
- Asep Nurdin Rosihin Anwar. 2018. Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 4 (2).
- Absori dkk. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial di Kota Yogyakarta. *Jurnal Jurisprudence*. Vol 10 (2).
- Fakhtul muin, 2014. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 8 (1).
- Sakinah Nadir. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik*. Vol 1 (1).
- Priskila Mustika Hayuning Pratama Soero dkk. 2014. Pemberdayaan Istri Nelayan Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Pada KUD Mina Jaya Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjang Wetan, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 2 (1).
- Matheus Nugroho. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumberdaya Manusia di Wilayah Pesisir Pantai. *Jurnal Teknologi Pangan*. Vol 6 (1).

- A. Kadar. 2015. Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Kemanan Nasional*. Vol 1 (3).
- Abdul Harris Karthago. 2014. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Seni Budaya di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2 (1).
- Lia Anggraini. 2019. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Perairan Danau Singkarak. *Journal of Education on Social Science*. Vol 3 (1).
- Billi Jenawi dkk. 2019. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah. *Jurnal Dialektika Publik*. Vol 4 (1).
- Maulana Ibrahim. 2016. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 4 (1).
- Fiqih Putra Arifandy. 2020. Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Vol 3 (1).
- Windasai dkk. 2021. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 2 (3).
- Armando Soares dkk. 2015. Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 4 (2).
- Alfian Helmi dan Arif Satria. 2012. Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis. *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol 16 (1).

Kristianti dkk. 2014. Strategi Bertahan Hidup Nelayan Buruh di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Jurnal Berkala Perikanan Terubuk. Vol 42 (1).

Umar Tangke. 2011. Pemanfaatan Sistem Informasi Perikanan Dalam Pengelolaan Sumberdaya. Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan. Vol 4(2)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomo 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.